



SUCCESS STORY

Luwu Utara tackles education inequality with good governance

Luwu Utara administration successfully redistributes 128 teachers to close the gap between its urban and rural schools.



Members of a multi-stakeholder forum and local government staff engage in a discussion about proportional teacher distribution. Strong public-private partnerships were crucial for Luwu Utara to address political challenges and initial resistance to this program.

“Teachers are reassigned because of their high levels of expertise, and not as a form of punishment.”

– Suhartatik
Teacher at SDN 099 Balebo,
Masamba, Luwu Utara

Kinerja

BRI II Building 28th Floor, Suite 2807
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta, 10210
Phone: +62 21 5702820
Fax: +62 21 5702832
www.kinerja.or.id

The uneven distribution of teachers between rural and urban areas remains a major issue in many of Indonesia's more than 500 districts. Schools in urban areas often employ more teachers than they need, while schools in more remote areas remain underserved.

However, through a partnership with USAID's Kinerja program – which aims to improve the governance of public service delivery in five provinces across the country – the district administration of Luwu Utara in South Sulawesi successfully utilized public participation to redistribute 128 teachers as a step toward addressing this imbalance in educational opportunities.

In 2012, Kinerja supported the local NGO Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan (LPKIPI) to conduct a preliminary study of the district's primary schools that revealed severe imbalances in the distribution of government-recruited classroom and subject-specific teachers. Only 47% of the district's 259 primary schools had an adequate number of government-recruited classroom teachers.

Using this data, the administration issued a district regulation on proportional teacher distribution in 2012 to provide a legal foundation for future reform efforts. Being aware that the distribution of teachers to remote areas needs political support and in order to minimize resistance to this initiative, the government conducted outreach and awareness-raising activities with multi-stakeholder forums, citizen journalists and teacher associations to promote a common understanding of the aims of the new policy and to simultaneously gain input on its ultimate implementation.

This attention to public input was crucial in helping the administration to overcome the political hurdles that had blocked progress in previous teacher reallocation efforts.

After months of public discussions, which were also aired live on local radio, 128 teachers were reassigned to 76 schools. The Luwu Utara administration allocated IDR 35 million in the district budget to help offset teachers' relocation costs. In addition, the government provided housing and an additional monthly stipend of IDR 500,000 for each teacher reassigned to a remote area.

The deputy district head of Luwu Utara, H. Indah Putri Indriani, said the initiative would help reduce the education gap between rural and urban areas and would provide a higher quality of education for children in remote areas.

Suhartatik, a teacher who was recently transferred, said that the move offered her better opportunities to apply her expertise and to gain new knowledge. She also reminded fellow teachers to not be afraid of being relocated, saying, “Teachers are reassigned because of their high levels of expertise, and not as a form of punishment.”

Continuing its commitment to accountability, the administration has asked citizen oversight groups to provide independent monitoring of the program's implementation in the field.

Based on the initiative's success in primary schools, Luwu Utara plans to roll out the proportional teacher distribution program for higher education as a follow-on initiative.

Kinerja continues to support education offices across Indonesia to review, analyze and develop recommendations for teacher management as part of the larger attempt to improve the governance of education services across the archipelago.

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS



KISAH SUKSES

Luwu Utara atasi kesenjangan pendidikan melalui tata kelola yang baik

Pemerintah kabupaten Luwu Utara berhasil memindahkan 128 guru untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antara sekolah di kota dan di desa.



Anggota forum multi-pemangku kepentingan berdiskusi dengan staf pemerintah kabupaten tentang distribusi guru proporsional. Kemitraan pemerintah dan masyarakat yang kuat sangat membantu Luwu Utara untuk mengatasi tantangan politik dan penolakan program ini.

“Guru dipindahkan karena keahliannya, bukan karena dihukum.”

– **Suhartatik**
Guru SDN 099 Balebo,
Masamba, Luwu Utara

Kinerja

Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta, 10210
Telepon: +62 21 5702820
Fax: +62 21 5702832
www.kinerja.or.id

Distribusi guru yang tidak merata antara kota dan desa masih menjadi tantangan besar bagi 500 kabupaten/ kota di Indonesia. Sekolah di kota biasanya mengalami kelebihan guru sementara sekolah di pedesaan kekurangan guru.

Namun, melalui kemitraan dengan program Kinerja USAID yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di lima provinsi di seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berhasil menggunakan partisipasi masyarakat untuk memindahkan 128 guru sebagai langkah untuk mengatasi kesenjangan kesempatan pendidikan.

Tahun 2012, LSM lokal yang didukung Kinerja, Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan (LPKIPI) melakukan studi awal tentang kebutuhan guru sekolah dasar di Luwu utara. Studi ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan besar dalam distribusi guru kelas dan guru mata pelajaran PNS. Hanya 47% dari 259 sekolah dasar di Luwu Utara yang memiliki cukup guru kelas PNS.

Berdasarkan data tersebut, pemerintah kabupaten menerbitkan peraturan bupati tentang distribusi guru proporsional tahun 2012 yang memberikan landasan hukum bagi upaya-upaya selanjutnya. Menyadari bahwa memindahkan guru ke daerah terpencil perlu dukungan politis dan untuk meminimalisir penolakan terhadap program ini, pemerintah kabupaten melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dengan forum multi-pihak, jurnalis warga dan asosiasi guru untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan kebijakan baru ini dan mendapatkan masukan untuk pelaksanaan program.

Perhatian pemerintah kabupaten terhadap masukan dari masyarakat sangat membantu pemerintah untuk mengatasi tantangan politis yang telah menghambat upaya pemindahan guru sebelumnya.

Setelah beberapa bulan melakukan diskusi publik yang juga disiarkan oleh radio lokal, 128 guru berhasil dipindahkan ke 76 sekolah. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga mengalokasikan Rp. 35 juta untuk membantu proses perpindahan guru. Selain itu, pemerintah menyediakan rumah dinas dan tunjangan bulanan sebesar Rp. 500 ribu untuk setiap guru yang dipindahkan ke daerah terpencil.

Wakil Bupati Luwu Utara, H. Indah Putri Indriani mengatakan bahwa program ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara desa dan kota dan akan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.

Suhartatik, salah satu guru yang ikut dipindahkan mengatakan bahwa mutasi ini memberikan kesempatan yang lebih baik untuk menerapkan keahliannya dan belajar ilmu baru. Beliau juga mengingatkan para guru yang lain untuk tidak takut dipindahkan. “Guru dipindahkan karena mereka punya keahlian tinggi, bukan karena dihukum.”

Untuk menjaga akuntabilitasnya, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah meminta kelompok pengawas publik, seperti forum multi-pemangku kepentingan untuk melakukan monitoring pelaksanaan program distribusi guru proporsional di lapangan secara mandiri.

Melihat keberhasilan program ini di sekolah dasar, Luwu Utara berencana untuk mereplikasi program distribusi guru proporsional ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kinerja melanjutkan dukungannya terhadap dinas pendidikan di seluruh Indonesia untuk mengkaji, menganalisa dan membuat rekomendasi manajemen guru sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia.

DILAKSANAKAN OLEH RTI INTERNATIONAL DAN MITRA